



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3, 4 dan 5
Telp. (021) 29079176 Ext. 1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 140/DJU/HK.00.1/1/2023
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Usulan Program Layanan Hukum
Di Lingkungan Peradilan umum

Jakarta, 24 Januari 2023

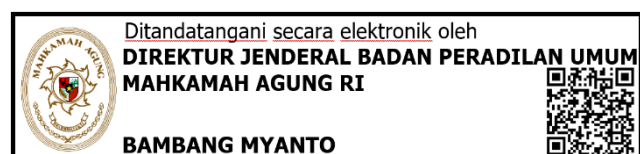
Yth. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap data usulan kebutuhan Layanan Hukum tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 sesuai dengan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 353/DJU3/HK.00.1/11/2022, didapati beberapa penginputan data yang tidak sesuai. Maka bersama dengan ini diminta kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri untuk mengisi kembali daftar usulan kebutuhan layanan hukum tersebut untuk tahun anggaran **2024, 2025 dan 2026 melalui link bit.ly/evaluasi_layananhukum** selambat-lambatnya **tanggal 26 Januari 2023** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap Ketua Pengadilan Negeri **wajib** mengisi dan mengupload surat pernyataan (terlampir);
2. Pengisian Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (PRODEO) dengan memperhatikan:
 - Pembebasan Biaya Perkara hanya diproses pada **tingkat pertama** dengan anggaran sebesar **Rp.670.000 per perkara**.

Apabila pengadilan negeri **tidak mengusulkan** anggaran layanan hukum untuk tahun 2024, 2025 dan 2026, maka kami anggap bahwa pengadilan negeri tersebut **tidak membutuhkan** anggaran layanan hukum, pengusulan ini agar benar – benar memperhitungkan kebutuhan masing – masing dengan ketentuan setiap pengadilan negeri wajib mengoptimalkan pemanfaatannya dengan memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan segera di laksanakan.



Tembusan:

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia.



- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

SURAT PERNYATAAN JAMINAN DAN KESANGGUPAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Dengan ini kami menyatakan bahwa usulan anggaran untuk Layanan Hukum yang kami ajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di Pengadilan Negeri* , dengan rincian sebagai berikut :

1. Usulan anggaran untuk Layanan Hukum Pos Bantuan Hukum sebesar Rp.** dengan target *** orang;
2. Usulan anggaran untuk Layanan Hukum Prodeo sebesar Rp.** dengan target *** perkara;
3. Usulan anggaran untuk Layanan Hukum Sidang Di luar Gedung Pengadilan sebesar Rp.** dengan target *** perkara.

Apabila di kemudian hari kami sebagai pimpinan Pengadilan Negeri tidak dapat merealisasikan usulan anggaran tersebut, maka kami siap menerima sanksi/teguran.

.....,.....20.....

Yang membuat pernyataan,
Ketua Pengadilan Negeri*

ttd

(Nama)
NIP.

Keterangan :

- * Isi dengan nama Pengadilan Negeri yang mengajukan
- ** Isi dengan jumlah anggaran yang diusulkan
- *** Isi dengan jumlah target yang diusulkan